

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan

Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan di Kabupaten Manggarai Timur masih sangat terbatas, masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa fungsi bantuan yang diberikan pemerintah, bagaimana cara mengelola bantuan tersebut, pendamping program keluarga harapan yang sedikit menyebabkan susah nya pemberian informasi kepada masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan.

2. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Mekanisme yang dijalankan di Kabupaten Manggarai Timur, masih belum sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 yaitu penetapan calon peserta program keluarga harapan, validasi data calon penerima manfaat program keluarga harapan, penetapan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan, pemutahiran data keluarga penerima manfaat dan transformasi kepesertaan keluarga penerima manfaat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka masukan atau saran bagi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur dapat lebih mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Dengan dikembangkan sumber daya manusia hal tersebut dapat membantu keberhasilan program keluarga harapan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
2. Kepada pemaku wilayah dapat mendata dengan sebaik mungkin agar tidak ada lagi kesalahan dalam proses pendataan dan berdiskusi dengan pihak Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perihal ketepatan sasaran supaya tidak terjadi kesalahan pendatan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyyah, Ludigdo, dan Mulawarman, 2017, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bergulir pada UPK-G*.
- Cendon, 2000, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*.
- Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.
- Erlina. 2015. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Selemba Empat.
- Edi Suharto, 2012, *Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa, Program Pendidikan Pasca Sarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial STKS, Bandung*.
- Erlina, 2008, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi 2, Cetakan pertama, USU Press, Medan*.
- Kumorotomo. Wahyudi, 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*.
- Muhammad Eko Permana Septian, 2018, *Peranan Dinas Sosial Dalam Memperdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten serdang Bedagai*.
- Monika Yuliani, 2020, *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Manggaukang. Raba, 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Nurlinda. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*
- Nasirah, 2016, *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Studi Pada Desa mulyoagung Kecamatan Dau*.
- Nurwati, 2008, *Kemiskinan Modek Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10 No. 1*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 *Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*.

Permensos, 2018, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tantang Program Keluarga Harapan*.

Rohmah, Y. A. 2015. *Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan. Jurnal Aplikasi Administrasi (Studi Deskriptis Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya)*. Vol18.

Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Belanja daerah*.

Rachmat. 2010. *Akuntabilitas Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sugiono (2015). *Metode Penelitian Kmbinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsono. Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Undang-undang Republik nomor 10 tahun 2010 *Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara*.

Viki Setiawan Rambe, 2019, *Peranan Dinas Sosial dalam Melakukan Bimbingan tentang Program Keluarga harapan (PKH) dalam pengetasan kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Sedang*.

Waluyo, 2007, *Manajemen Publlik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*.

Yosa Saputa, 2017, *Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tambilahan Kabupaten Indragiri Hilir*.